

Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia

Dyah Rahmi Astuti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dyah.rahmiastuti@uinsgd.ac.id

M. Yusuf Wibisono

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
m.yusufwibisono@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Astuti, Dyah Rahmi & Wibisono, M. Yusuf. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 1: -. 10.14505/jis.v2. (1).1.

Article's History:

Received February 2022; Revised February 2022; Accepted February 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This article aims to describe the role of Islamic community organizations in Indonesia's development. The method used in this paper is descriptive analysis. The discussion results show that Islamic organizations played a role in the struggle for independence in the cases of the Nahdlatul Ulama Jihad Resolution and the Muhammadiyah Jihad Mandate. The role of post-independence until now has been Nahdlatul Ulama Islamic Boarding School Education and Muhammadiyah Formal Education. Islamic organizations need to play an active role in Indonesia's development in terms of its role as a liaison between people's aspirations and the government. Also that Islamic organizations must increase their role in deradicalization programs to prevent terrorist acts and radicalism.

Keywords: *Islamic organizations; jihad resolution; Islamic boarding school; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama*

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terhadap pembangunan Indonesia. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah analisis deksriptif. Hasil pembahasan menunjukkan ormas Islam berperan di masa perjuangan kemerdekaan dalam kasus-kasus Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Amanat Jihad Muhammadiyah. Peran pada paska kemerdekaan hingga sekarang adalah Pendidikan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Formal Muhammadiyah. Ormas Islam perlu berperan aktif bagi kemajuan pembangunan Indonesia dalam hal perannya sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Juga bahwa ormas Islam harus meningkatkan perannya dalam program deradikalisasi untuk mencegah tindakan teroris dan radikalisme.

Kata Kunci: ormas Islam; resolusi jihad; pondok pesantren; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama

PENDAHULUAN

Ormas Islam merupakan organisasi yang didirikan secara sukarela oleh tokoh-tokoh Islam dengan dakwah sebagai tujuan utamanya (Rahman, 2021). Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam dari dahulu sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang (Wibisono, 2020). Tokoh-tokoh agama Islam kemudian mendirikan organisasi Islam yang menjadi wadah bernaungnya masyarakat pemeluk agama Islam (Rahman & Setia, 2021). Ormas Islam di Indonesia memiliki peranan penting sejak sebelum kemerdekaan. Novianti (2008) menyatakan bahwa ormas Islam di Indonesia saat ini sebagai *civil society* yang kuat, perannya begitu

penting sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang (Amy, 2009). Peran ormas Islam tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan terutama bagi kemashlahatan umat baik di bidang pendidikan, sosial, budaya dan politik (Setia, 2021b).

Berdasarkan data dari *realworldevaluation.org*, mayoritas ormas Islam berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Ormas Islam yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia antara lain Jam'iyatul Khair yang didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta, Syarekat Islam yang didirikan oleh KH. Samanhudi di Solo tahun 1905, Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912, Nahdlatul Ulama (NU) oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jawa Timur, Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1923 dan masih banyak ormas lainnya (Brewer, 2020; Wildan et al., 2015).

Berdirinya ormas Islam oleh tokoh-tokoh Islam pada masa perjuangan kemerdekaan bertujuan untuk berdakwah menyampaikan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam. Penyampaian dakwah tersebut salah satunya diwujudkan dengan didirikannya sarana pendidikan baik formal maupun informal, seperti ormas NU yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur mendirikan banyak pondok pesantren NU yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia (Ida, 2004).

Ormas Islam lainnya yaitu Muhammadiyah yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, mendirikan sarana pendidikan formal sebagai media dakwahnya. Masa sebelum kemerdekaan Muhammadiyah mendirikan sekolah rakyat di kampung kauman Yogyakarta, murid laki-laki bersekolah di *Standard School Muhammadiyah* sedangkan murid perempuan bersekolah di Sekolah Rakyat Pariwayata, Kauman. Lembaga pendidikan Muhammadiyah daln lembaga pendidikan pondok pesantren NU dan lembaga lain yang didirikan oleh ormas lainnya memiliki peranan penting bagi perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia (Shihab, 2016).

Keberadaan ormas Islam pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia berkontribusi dalam melawan penjajah. Tokoh-tokoh Islam pada saat itu memiliki peranan penting dalam meraih kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan Indonesia pun mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data paper dari *nu.or.id* peristiwa melawan penjajah pada tanggal 10 November, pasukan perangnya terdiri dari para tentara dan santri dari berbagai pesantren di berbagai daerah yang berniat jihad membela negara. Pengaruh ormas Islam tidak terhenti setelah Indonesia merdeka namun tetap berperan penting sampai dengan hari ini (Rosyad et al., 2021). Ormas Islam dengan dakwah sebagai tujuan utamanya tentu terus mengalami dan mengikuti perkembangan zaman dan melakukan penyesuaian cara berdakwah yang terus berubah mengikuti perkembangan medan dakwah.

Berdasarkan data dari *kemenag.go.id* ormas Islam saat ini menyadari betapa strategisnya peranan dakwah dan kemampuan merespon tantangan yang dihadapi umat saat ini sehingga ormas Islam masih tetap eksis dan banyak berkontribusi di masyarakat. Keberadaanya yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan telah berpengaruh banyak terhadap pemberdayaan umat (Romadanyl, 2021).

Peran ormas Islam dari masa sebelum kemerdekaan dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan dan perjuangan untuk mengisi kehidupan berbangsa bernegara, sesuai dengan cita-cita pembentukannya yaitu Indonesia yang bersatu, adil dan makmur serta berdaulat (Machmudi, 2013). Peran ormas Islam saat ini di berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara terutama terhadap umat dan generasi penerus bangsa. Hal tersebut menjadi suatu kajian yang menarik bagaimana organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam sebagai *civil society* yang kuat dan keberadaan serta pengaruhnya cukup besar dari dulu hingga sekarang terhadap kemerdekaan negara dan kemajuan negara.

Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan mencakup seluruh sistem sosial meliputi politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan menurut Tikson (2005) merupakan transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Struktur ekonomi memandang transformasi sebagai peningkatan yang cepat dari dua sektor yaitu industri dan jasa yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional. Sedangkan sektor pertanian memiliki berkontribusi secara terbalik dengan pertumbuhan modernisasi ekonomi dan industrialisasi. Pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi seperti perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, fasilitas rekreasi dan keterlibatan dalam pembuatan keputusan politik merupakan ciri dari transformasi sosial (Sajogyo, 1985). Sedangkan transformasi budaya biasanya dikaitkan dengan adanya nasionalisme dan semangat kebangsaan, dan adanya perubahan norma serta nilai yang dianut oleh masyarakat.

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro maupun mikro. Makna penting dari pembangunan menurut Sulistiani et al.

(2017) adalah adanya kemajuan dan pertumbuhan. Pembangunan merupakan segala upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang menghasilkan perubahan, sedangkan perkembangan merupakan proses yang terjadi secara alami yang merupakan hasil dari terjadinya pembangunan.

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan merupakan proses komunikasi yang terorganisir dengan memanfaatkan media untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial yang berlangsung secara umum di negara berkembang. Komunikasi pembangunan menurut Wibowo et al. (2011) merupakan proses komunikasi bermuatan pesan-pesan pembangunan dari berbagai macam tingkatan, yaitu tingkat pemerintah, pejabat, petani dan juga berbentuk musyawarah serta komunikasi kelompok dalam suatu lembaga resmi atau kumpulan biasa. Komunikasi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat.

Komunikasi pembangunan dalam arti luas menurut Dilla (2007) meliputi fungsi dan peran komunikasi sebagai kegiatan pertukaran pesan secara timbal balik pada pemerintah dan masyarakat, yaitu mulai dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi. Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan diartikan sebagai segala cara, teknik dan upaya menyampaikan pemikiran serta keterampilan pembangunan dari pemrakarsa pembangunan kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterima dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Komunikasi pembangunan bertujuan memberantas pengangguran, kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat. Komunikasi pembangunan memiliki hal utama menurut Dilla (2007) yaitu memperluas wawasan berpikir, memperdalam pemahaman, memperkaya penerahuan dan keterampilan serta memberdayakan masyarakat secara komprehensif. Rumus lain dari komunikasi pembangunan yaitu komunikasi yang menghasilkan perencanaan pembangunan suatu bangsa sebagai proses pembaharuan dan perubahan masyarakat (Huriani, 2021). Pembangunan memerlukan komunikasi yang baik sebagai bagian dari kegiatan masyarakat sehari-hari dan sebagai ilmu yang terus mengalami perkembangan.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam

Ormas Islam merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan tujuan utama yaitu dakwah oleh para tokoh-tokoh Islam secara sukarela (Setia & Rahman, 2021). Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan di Kemenhukam terdaftar banyak ormas Islam, baik ormas yang aktif dan populer secara nasional maupun lokal di lingkungan daerah tertentu saja. Ormas Islam yang populer di lingkup nasional dan memiliki pengaruh yang besar diantaranya Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta, Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri di Jawa Timur, serta Persatuan Islam di Bandung. Adapun Ormas Islam lainnya yang terkenal di daerah seperti Mathlaul Anwar di Banten, Al Washliyah di Medan Sumatera Utara, Nahdlatul Wathan di Lombok dan masih banyak Ormas Islam di daerah lainnya (Hanafi et al., 2020).

Keberadaan ormas Islam memiliki peran penting bagi masyarakat, adanya ormas Islam menjadi tempat bernaung, mengumpulkan semangat persatuan dan semangat berdakwah. Ormas Islam menurut Machmudi (2013) merupakan kekuatan bagi umat Islam dalam berpegang teguh pada aqidah Islam dengan ilmu syar'i yang membentengi dari kehancuran Islam melalui pemikiran musuh-musuh Islam. Ormas Islam juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Berdirinya ormas Islam memunculkan berbagai tanggapan dan sikap dari umat Islam sendiri. Menurut Nafi (2018), terdapat tiga reaksi umat Islam terhadap keberadaan ormas Islam yaitu pertama sikap fanatik, merupakan sikap membenci dan menolak. Sikap ini berasal dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pemikiran bahwa organisasi yang diikutinya adalah yang paling baik dan benar dalam pemahaman, pemikiran dan lainnya. Kedua, sikap lebih bangga terhadap organisasi lain dibandingkan organisasinya sendiri. Sikap ini berasal dari orang atau sekelompok orang yang memiliki anggapan organisasi lain lebih baik dibanding organisasinya. Hal ini terjadi karena adanya kekecewaan atau ketidakpuasan yang didapatkan dari organisasi yang diikutinya. Ketiga, sikap pertengahan yaitu sikap toleransi yang tinggi, tidak menganggap organisasinya paling benar dan tidak menganggap organisasi lain lebih baik. Sikap yang ditunjukkan dengan menghargai dengan penuh kesadaran adanya perbedaan dan setiap orang berhak menentukan pilihannya mengikuti organisasi manapun. Lebih lanjutnya orang atau sekelompok orang dengan sikap ketiga ini mengharapkan adanya persatuan dan kesatuan dari perbedaan organisasi yang diikutinya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ormas Islam merupakan suatu organisasi yang memiliki peran penting di masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan (Lolytasari & Istiqoriyah, 2018). Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 namun perjuangan tidak selesai sampai disitu. Belanda yang menjajah Indonesia masih memiliki keinginan untuk berkuasa kembali di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat itu yang mayoritas beragama Islam bernaung dalam berbagai Ormas Islam yang didirikan oleh para tokoh ulama (Ismail, 2017).

Peran Ormas Islam di Masa Perjuangan Kemerdekaan

a. *Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama*

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng Jawa Timur pada 31 Januari 1926 jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno bukan akhir dari segalanya. Indonesia masih harus berjuang melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa (Ni'am, 2015).

K.H. Hasyim Asy'ari pimpinan Nahdlatul Ulama saat itu memiliki pengaruh besar di kalangan Ulama dan santri se-Jawa dan Madura ditemui oleh presiden Soekarno sebelum terjadinya peristiwa 10 November 1945. Presiden Soekarno bertanya kepada K.H. Hasyim Asy'ari tentang bagaimana sikap umat Islam terhadap penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. K.H. Hasyim kemudian menjawab bahwa umat Islam akan *jihad fisisabilillah* untuk Indonesia. Pernyataan ini yang dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Sikap Presiden Soekarno menemui Kiyai Hasyim merupakan satu tindakan yang tepat karena saat itu para pemimpin pasukan di Indonesia diantaranya Badan Keamanan Rakyat (BKR), Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dipimpin oleh para ulama. Kiyai Hasyim yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam saat itu menjadi satu kunci yang dapat menggerakkan semuanya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan negara dengan pernyataan resolusi jihadnya (Setia, 2021b).

Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama merupakan hasil tanggapan serta keputusan NU terhadap kondisi negara dan bangsa yang dibacakan langsung oleh Kiyai Hasyim tepat di tanggal 22 Oktober tahun 1945 (Saputra, 2019). Resolusi Jihad NU berisi pernyataan dan fatwa hukum dalam memperjuangkan dan memertahankan kemerdekaan adalah wajib 'ain bagi umat Islam, serta perang suci bagi yang berperang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia (Bizawie, 2020). Hasil keputusan dan tanggapan NU yang dibacakan langsung oleh Rois Akbar K.H. Hasyim Asy'ari dicermati sebagai suatu upaya penyampaian pesan pembangunan dari pimpinan ormas Islam kepada umat Islam. Hal ini seperti diungkapkan Dilla (Dilla, 2007) yang menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan pembangunan yang berasal dari tokoh prakarsa pembangunan kepada masyarakat sebagai sasarannya. Pesan pembangunan yang disampaikan yaitu perintah *jihad fisisabilillah* melawan penjajah yang ingin kembali menguasai tanah air.

Pesan pembangunan berupa perintah jihad dari K.H. Hasyim Asy'ari ini berhasil menggerakkan para santri dan ulama dalam satu kumpulan bernama Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah di Jawa dan Madura yang semangat serta berani berperang melawan penjajah (Lolytasari & Istiqoriyah, 2018). Hingga pertempuran pecah pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Pasukan Indonesia yang terdiri dari BKR, PETA, ulama dan para santri berhasil memenangkan peperangan. Penjajah dan sekutu kewalahan karena bangsa Indonesia saat itu sulit dikalahkan (Ismail, 2017).

b. *Amanat Jihad Muhammadiyah*

Muhammadiyah merupakan Ormas Islam yang juga mengeluarkan fatwa ketika Indonesia kembali didatangi penjajah setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut dinamakan Amanat Jihad yang disebarluaskan melalui surat kabar. Fatwa ini sejalan dengan resolusi jihad yang dideklarasikan oleh Nahdlatul Ulama. Penyebaran Amanat Jihad Muhammadiyah melalui surat kabar merupakan salah satu upaya penyampaian pesan pembangunan dengan memanfaatkan media cetak sebagai sarana komunikasinya. Pembangunan negara pada prosesnya seperti yang dikatakan Dilla (2011: 121) memerlukan kontribusi komunikasi sebagai bagian dari interaksi.

Amanat Jihad Muhammadiyah mengandung empat pokok seruan bagi umat Islam, pertama himbuan kepada seluruh masyarakat untuk meyakini bahwa Indonesia telah merdeka karena saat itu masih banyak tentara Jepang yang menetap di Indonesia dan kabar kemerdekaan belum sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Pokok kedua

dalam Amanat Jihad Muhammadiyah berisi seruan wajib kepada seluruh umat Islam untuk membela negara dari penjajah yang ingin berkuasa kembali. Ketiga, dorongan kepada perempuan untuk mengambil bagian dalam peperangan. Peran yang dimaksud berupa tugas perawatan, pengobatan, konsumsi dan sejenisnya yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan tanpa harus terjun langsung ke medan perang. Pokok keempat yaitu doa dan harapan agar negara Indonesia menang dalam peperangan dan harapan agar segera merdeka, bahagia, berjaya dan menjadi negara yang aman serta tentram.

Peran Ormas Islam Pasca Kemerdekaan

a. Pendidikan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, berperan serta dalam bidang pendidikan sejak didirikannya pada tahun 1926 (Mustari & Rahman, 2012). NU sangat memperhatikan pendidikan terutama keberadaan pondok pesantren. Mencerdasakan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren menjadi salah satu misi utamanya. NU memiliki berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah (van Bruinessen, 1994). Lembaga pendidikan tersebut yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki kelebihan kekuatan unik tersendiri berupa nilai-nilai yang jarang dimiliki oleh lembaga lain. Kekuatan dan kekhasan pondok pesantren tersebut yang menyebabkan masih bertahannya pondok pesantren ditengah perkembangan zaman dan perubahan masyarakat (Mustaqim, 2015).

NU mendirikan *Rabthah Ma'ahid Al-Islamiah* (RMI) yang membina seluruh pondok pesantren dibawah naungan NU. Sedangkan untuk pendidikan formal, NU mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dengan nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU) (Anwar et al., 2017). Kedua lembaga tersebut berdiri dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita NU dalam bidang pendidikan. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksanaan NU dalam kebijakan-kebijakan pendidikan NU yang ada di berbagai tingkatan Pengurus NU baik di pusat maupun cabang (Saputra, 2019).

Lembaga pendidikan NU berdiri berdasarkan cita-cita para ulama berlatarkan kondisi umat yang sangat terpuruk selama dijajah oleh Belanda. Umat Islam sangat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi keagamaan lain di luar Islam dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran. Peran dan sumbangan NU dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tercatat dalam sejarah tidaklah dianggap kecil. Perannya begitu besar apabila kita melihat pondok pesantren, madrasah atau sekolah NU yang berdiri secara tradisional dan diprakarsai oleh masyarakat dengan semangat karena Allah SWT, dan samapi saat ini terus berkembang secara pesat hingga menjadi pilihan umat (Herman, 2013).

Pendidikan pondok pesantren yang dirintis, dikelola dan berkembang secara mandiri oleh para ulama serta tokoh NU merupakan peran pendidikan NU yang bersifat alternatif. Sampai saat ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat. NU juga berperan pada pendidikan yang bersifat partisipatif dengan adanya sekolah-sekolah formal NU berupa madrasah, sekolah madrasah terpadu, sekolah umum hingga jenjang pendidikan universitas. Lembaga pendidikan lainnya yang strategis yaitu pondok pesantren yang bersatu dengan sekolah formal (Rahman, 2016).

Pondok pesantren di Indonesia saat ini berjumlah 28.800 ponpes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 23.372 merupakan pondok pesantren yang berada dibawah naungan NU (Arifin, 2012). Sedangkan untuk pendidikan formalnya NU memiliki 12.094 sekolah dengan berbagai tingkatan yaitu ibtdaiyah, tsanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, SD, SMP, SMA dan SMK. Pendidikan pondok pesantren di seluruh wilayah di Indonesia berperan besar terhadap transformasi di bidang pendidikan terutama terhadap generasi muda penerus bangsa (Hasbullah & Rahman, 2018). Pondok pesantren NU ini menjadi salah satu sarana terbentuknya generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia serta berkualitas dari segi intelektual, sosial, emosional terutama spiritual (Mustari & Rahman, 2012).

b. Pendidikan Formal Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang menggunakan jalan modernisasi sistem pendidikan dalam membuat pembaharuan pendidikan agama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan perkembangan zaman (Burhani, 2019). Muhammadiyah mendirikan fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah umum dengan ciri khusus keagamaan di berbagai tingkatan pendidikannya. Muhammadiyah terus mengalami perkembangan dan peningkatan peran serta memperluas kerja dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut membuahkan hasil yang nyata dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah yang terdiri dari ribuan

pendidikan formal mulai tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, fasilitas sosial berupa panti jompo dan pasnti asuhan, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan rumah sakit bersalin dan lembaga ekonomi. Muhammadiyah adalah pelopor pembaharuan pendidikan Islam, pembaharuan tersebut yaitu berupa cita-cita serta teknik dalam pengajaran. Segi cita-cita yang dimaksud oleh Kiyai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah yaitu membentuk umat muslim yang memiliki budi pekerti luhur, alim dalam beragama, memiliki pandangan yang luas serta memahami masalah-masalah keduniaan serta memiliki jiwa perjuangan bagi kemajuan masyarakat (Burhani, 2018).

Sedangkan segi teknik yang dimaksud yaitu yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pendidikan berdasarkan unsur-unsur dari sistem pendidikan barat atau sistem pendidikan tradisional, namun Muhammadiyah memiliki sistem pendidikan sendiri yang berbeda dengan lainnya. Pendidikan Muhammadiyah berdasarkan hasil temuan paper, didirikan dan dilandasi atas motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketaqwaan yang sempurna apabila memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Muhammadiyah menempatkan pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi sosial keagamaan. Hal tersebut telah menghasilkan keberhasilan dalam mencerdaskan umat Islam dan bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan Muhammadiyah di tingkat dasar dan menengah yaitu membentuk umat Islam yang beriman, memiliki akhlakul karimah, memiliki ketakwaan, memiliki kecerdasan, kepercayaan diri, memiliki tanggung jawab, cinta tanah air dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang didedikasikan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan memperoleh ridha Allah SWT (Nashir, 1997).

Pendidikan formal berbagai tingkatan dari mulai taman kanak-kanak hingga tingkat universitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berperan besar terhadap transformasi sosial bidang pendidikan terutama terhadap generasi muda penerus bangsa (Ali, 2016). Pendidikan formal Muhammadiyah di berbagai jenjang ini menjadi salah satu sarana terbentuknya generasi penerus bangsa yang tidak terbelakang dari segi pendidikan serta berkualitas dan memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial serta spiritual.

Peran Ormas Islam Bagi Kemajuan Pembangunan Indonesia

Ormas pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan dan kemaslahatan bangsa. Ormas dibentuk dengan tujuan untuk menjaga, memelihara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, setiap ormas memiliki kewajiban untuk tetap menjaga norma, etika dan nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat. Pembentukan ormas terutama yang telah diakui dan terdaftar di negara, adalah ormas yang sejalan dengan tujuan negara, apabila sudah tidak lagi sejalan maka negara memiliki kuasa untuk mengeluarkan dari daftar ormas di Indonesia bahkan membubarkannya (Huriani, 2021). Berdasarkan hal tersebut, Ormas ikut terlibat dalam mewujudkan persatuan, kesatuan dan kemaslahatan bangsa dan diharapkan dapat berperan secara maksimal.

a. Meningkatkan Peran sebagai Penghubung Aspirasi Masyarakat dengan Pemerintah

Aspirasi masyarakat merupakan harapan-harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk keberhasilan dan kesejahteraan hidup dan hajat mereka secara individu maupun kelompok di masa saat ini hingga di masa yang akan datang. Aspirasi dapat disampaikan dengan berbagai cara, ada yang dengan cara baik melalui prosedural yang berlaku. Media konvensional seperti koran sejak dulu berperan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan harapan masyarakat kepada pemerintah atau terhadap kebijakan baru yang ditetapkan (Humas DPRD Jabar, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial saat ini menjadi salah satu sarana terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi (Setia, 2021c). Media sosial saat ini dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan suara masyarakat yang merupakan bentuk dari berdemokrasi. Media sosial memiliki peran yang besar bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapat serta dinilai efektif sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Menyampaikan aspirasi melalui media sosial harus dengan hati-hati dan disertai tanggung jawab penuh terhadap aspirasi yang disampaikan karena meskipun bersifat bebas dan terbuka tetap ada undang-undang yang mengaturnya. Penyampaian argumen dengan kalimat dan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan masalah atau peristiwa yang dimaksud. Hal ini bertujuan agar argumen yang disampaikan dapat didengar oleh pihak yang dimaksud.

Keterbukaan aspirasi dan kebebasan menggunakan media sosial sebagai sarana penyalur aspirasi saat ini tidak menghilangkan fungsi Ormas Islam sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Ormas Islam sebagai satu lembaga yang dapat mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang kemudian didengar dan ditanggapi oleh pemerintah. Ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia diharapkan

dapat menjaga harmonisasi dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Ormas Islam dapat menjalin harmonisasi hubungan dengan pemerintah yang bertugas menampung aspirasi yang kemudian menjadi salah satu jalan tersampainya dengan baik aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

b. Meningkatkan Program Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan pelaksanaan pendekatan interdisipliner meliputi agama, psikologi, hukum, kemanusiaan, pendidikan dan sosial budaya untuk menetralkan paham-paham radikal bagi yang terpengaruh paham-paham radikal seperti aksi terorisme. Terorisme merupakan tindakan radikal yang menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat dan negara. Deradikalisasi menjadi salah satu program yang dapat mencegah terjadinya aksi terorisme. Aksi terorisme menurut Analisis Kebijakan divisi Humas Polri yaitu terbentuknya komunitas fanatik pendukung gerakan radikal yang mendoktrin pengikutnya dengan berbagai cara baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Terorisme juga disebabkan oleh adanya ideologi yang memperbolehkan untuk melakukan aksi pembunuhan serta kekerasan. Ideologi tersebut membuat para penganut radikalisme tidak memiliki rasa ragu untuk melakukan aksi teror (Sulhan, 2018).

Ancaman terorisme bukan hanya tertuju pada keamanan, keselamatan dan perdamaian saja namun juga berdampak pada sebagai aspek dalam kehidupan sehari-hari meliputi hukum, ekonomi dan sosial. Upaya secara komprehensif perlu dilakukan dalam memerangi terorisme, bahkan penanggulangannya perlu dilakukan oleh semua pihak meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga peran dari masyarakat sipil serta ormas termasuk ormas Islam (Syah & Setia, 2021).

Berdasarkan data dari *merdeka.com*, masyarakat sipil dan organisasi keagamaan dalam satu dekade terakhir ini memiliki pengaruh cukup besar terhadap pencegahan aksi terorisme di Indonesia (Astuti, 2021). Masyarakat sipil beraksi memperkuat relasi antar komunitas di lingkungannya dalam menanggapi persoalan terorisme dengan tujuan membangun ketahanan masyarakat dari terpaan paham radikal dan aksi terorisme. Agenda utama keterlibatan ormas Islam dalam mencegah aksi terorisme dan radikalisme yaitu meningkatkan program deradikalisasi di berbagai kelompok masyarakat. Ormas Islam dirasa perlu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya ideologi radikalisme. Ormas Islam juga perlu bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengadakan program deradikalisasi di Lapas bagi narapidana terorisme yang berada di dalam lapas dengan melakukan identifikasi, rehabilitasi, edukasi dan sosialisasi (Setia, 2021a). Program deradikalisasi juga dapat dilakukan di luar lapas dengan sasaran potensi radikal, mantan narapidana, keluarga dan jaringannya dengan melakukan identifikasi, pembinaan pengawasan kebangsaan dan agama serta bina kemandirian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Ormas Islam memiliki peranan penting sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia Ormas Islam berperan penting menggerakkan para ulama dan umatnya untuk membantu negara berjihad melawan penjajah, Nahdlatul Ulama mengeluarkan Resolusi Jihad dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Amanat Jihad. Masa setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini ormas Islam berperan dalam perubahan sosial terutama di bidang pendidikan. Nahdlatul Ulama yang memiliki 23.372 pondok pesantren dari 28.000 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Muhammadiyah memiliki 10.000 sekolah formal dari tingkat taman kanak-kanak hingga universitas. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut berperan penting terhadap pembentukan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkualitas dan cerdas secara sosial, intelektual, emosional, dan spiritual. Ormas Islam saat ini perlu berperan aktif untuk meningkatkan pembangunan di negara Indonesia. Ormas Islam perlu mampu menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, menjaga harmonisasi hubungan baik antar organisasi, dengan masyarakat sipil juga dengan pemerintah. Ormas Islam perlu meningkatkan program deradikalisasi untuk mencegah aksi-aksi teroris dan radikalisme yang menjadi ancaman bagi masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Membedah tujuan pendidikan muhammadiyah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(01), 43–56.
- Amy L., F. (2009). Civil Society, Moderate Islam, and Politics in Indonesia and Malaysia. *Journal of Civil Society*,

- 5(2), 107–127. <https://doi.org/10.1080/17448680903154907>
- Anwar, R. K., Komariah, N., & Rahman, M. T. (2017). Pengembangan Konsep Literasi Informasi Santri: Kajian di Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.964>
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan pesantren di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 40–53.
- Astuti, N. F. (2021). Mengenal Penyebab Terorisme, Ketahui Strategi Pencegahannya. *Merdeka.Com*, Diunduh pada 12 Desember 2021.
- Bizawie, Z. M. (2020). *Laskar Ulama-Ulama Santri Resolusi Jihad*. pustaka compass.
- Brewer, K. (2020). Perjalanan Hadirnya Organisasi Islam di Indonesia. *Realworldevaluation.Org*, Diunduh pada 25 Oktober 2021.
- Burhani, A. N. (2018). Pluralism, liberalism, and islamism: religious outlook of muhammadiyah. *Studia Islamika*, 25(3), 433–470.
- Burhani, A. N. (2019). Muhammadiyah. *Encyclopaedia of Islam, 3rd Edn*. Leiden: Brill.
- Deddy, T. T. (2005). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Dilla, S. (2007). Komunikasi Pembangunan pendekatan terpadu. *Bandung: Simbiosis Rekatama Media*.
- Hanafi, H., Syarifudin, S., Nurfaizal, D., & Nurjanah, S. (2020). *Kajian Ontologis Studi Agama-Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2018). Elit Politik Islam Nasional dan Pengembangan Pesantren di Daerah. *Jurnal Socio-Politica*, 8(1), 45–56.
- Herman, H. (2013). Sejarah Pesantren di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2), 145–158.
- Humas DPRD Jabar. (2020). Humas DPRD Jabar Jelaskan Mekanisme Penyampaian Aspirasi Kepada Wakil Rakyat. *Jabarprov.Go.Id*, Diunduh pada 13 Desember 2021.
- Huriani, Y. (2021). *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia*. Lekkas.
- Ida, L. (2004). *NU muda: kaum progresif dan sekularisme baru*. Erlangga.
- Ismail, H. F. (2017). *Panorama sejarah Islam dan politik di Indonesia*. IRCiSoD.
- Lolytasari, L., & Istiqoriyah, L. (2018). Arsip Sejarah Ormas Islam: Studi Kasus Penyelamatan Arsip Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. *Buletin Al-Turas*, 24(1), 107–124.
- Machmudi, Y. (2013). Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia. *Depok: PTTI UI*.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 42(1), 58–84.
- Mustaqim, M. (2015). Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama. *Addin*, 9(2).
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Ekonomi Pesantren: Manajemen Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Desa* (Vol. 1, Issue 1). Lintang Publishing.
- Nafi, M. Z. (2018). *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Nashir, H. (1997). *Persentuhan Muhammadiyah dan Politik*. Suara Muhammadiyah.
- Ni'am, S. (2015). Pesantren: The miniature of moderate Islam in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5(1), 111–134. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.111-134>
- Novianti, I. (2008). Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagamaan Remaja. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 250–259.
- Rahman, M. T. (2016). *Pendidikan Karakter Islam Modern di Sekolah Berbasis Pesantren*.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.12269>
- Romadanyl. (2021). Wamenag: Kontribusi Ormas Islam Menentukan Wajah Depan Indonesia. *Kemenag.Go.Id*, Diunduh pada 25 Oktober 2021.
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*. Lekkas.
- Sajogyo, P. (1985). *Sosiologi Pembangunan*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Saputra, I. (2019). Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 205–237.
- Setia, P. (2021a). ATAS NAMA ISLAM: KAJIAN PENOLAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP PLURALISME. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 115–136.
- Setia, P. (2021b). Kampanye Moderasi Beragama Melalui Media Online: Studi Kasus Harakatuna Media. In P. Setia & R. Rosyad (Eds.), *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital* (I, pp. 167–180). Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P. (2021c). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1(2), 33–45.
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9(2), 241–264.
- Shihab, A. (2016). *Membendung arus: respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
- Sugihen, B. G., Sulistiani, I., & Sumardjo, N. P. (2017). Peran Komunikasi dalam Pengembangan Energi Sosial Masyarakat di Papua. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 18(1), 43–56.
- Sulhan, M. (2018). *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*.
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4).
- van Bruinessen, M. M. (1994). *Pesantren and kitab kuning: Continuity and change in a tradition of religious learning*.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Wibowo, C. T., Hafidhuddin, D., & Agung, S. S. (2011). Strategi Pengembangan Komunikasi Massa dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dengan Pendekatan Jati Diri Bangsa yang Berorientasi pada Budaya. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 9(2).
- Wildan, D., Khaeruman, B., Rahman, M. T., & Awaludin, L. (2015). *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Amana Publishing.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).